

BAB IV

KESIMPULAN

Perjalanan pers di Surabaya pada tahun 1960-1965 dipenuhi oleh liku-liku kehidupan pers yang kompleks. Pada saat itu kondisi di Surabaya sendiri memang belum stabil, hal ini merupakan dampak dari kehidupan politik di pusat, dimana pemerintah sedang menjalankan politik Demokrasi Terpimpin.

Pemerintah semakin memperketat peraturan-peraturan terhadap pers yang ada di Surabaya, tujuannya adalah untuk memudahkan mengadakan pengawasan terhadap pers itu sendiri demi menjalankan terwujudnya Demokrasi Terpimpin yang teratur. Hal ini terlihat dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

Peraturan-peraturan tersebut digunakan oleh Pemerintah untuk mengawasi pers agar tidak membahayakan kelangsungan jalannya Demokrasi Terpimpin, bahkan jika ada pers yang melanggar peraturan tersebut akan dicabut surat izinnya untuk tidak terbit lagi.

Perkembangan pers di Surabaya pada tahun 1960-1965 merupakan masa dimana pers mengalami gejolak. Hal ini karena pada saat itu Indonesia mengalami krisis baik sosial, politik maupun ekonomi yang begitu berat. Dengan adanya krisis tersebut dan dengan usaha PKI untuk menguasai pemerintahan pusat melalui berbagai cara. Pers digunakan oleh PKI sebagai

alat untuk mendukung aksinya dan juga digunakan sebagai alat mempengaruhi masyarakat melalui beragam berita yang sangat kontroversial serta sebagai senjata untuk meyerang pihak lain yang tidak disukainya.

Usaha tersebut mendapat rintangan dari kalangan pers itu sendiri, terutama dari pihak-pihak yang tidak menyukai PKI. Hal ini menimbulkan berbagai konflik dikalangan pers seperti adanya BPS (Badan Pendukung Sukarnoisme) yang didirikan oleh kalangan pers yang tidak menyukai PKI yang dituduh PKI sebagai alat CIA (Intelejen Amerika) untuk menghancurkan ajaran Soekarno dan Soekarno sendiri, sampai badan tersebut dibubarkan oleh Presiden Soekarno.

Perjuangan pers yang menentang PKI tidak berhenti sampai disitu, mereka berusaha untuk memukul PKI sampai adanya pemberontakan G30 S yang diduga PKI terlibat didalamnya. Akhirnya semua surat kabar PKI di Surabaya dihentikan penerbitannya oleh pemerintah karena dianggap sebagai pihak yang akan menghancurkan bangsa dan negara.

Pers pada tahun 1960-1965 digunakan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuannya, selain itu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengekang kebebasan pers dan kemajuan pers itu sendiri.

Kondisi semacam itu membuat pers di Surabaya harus mengikuti pola yang berlaku, sehingga timbul golongan-golongan dalam pers itu sendiri. Golongan pertama disebut sebagai golongan kanan atau nasionalis, pers di pihak ini menentang usaha-usaha PKI dalam aksinya merebut pemerintahan

pusat. Pers golongan ini menyebarkan berita yang isinya membuat opini di masyarakat agar masyarakat membenci PKI. Pers golongan kanan mempunyai ciri:

- Banyak menulis berita yang isinya menyudutkan PKI beserta ormasnya.
- Banyak mengungkap keburukan PKI.

Golongan kedua disebut golongan kiri atau pers yang mendukung PKI. Pers golongan kiri tersebut sangat mendukung kegiatan PKI di segala bidang. Pers golongan kiri ini menyebarkan berita yang isinya membuat opini di masyarakat agar masyarakat mengikuti dan simpati terhadap kegiatan PKI dan ormasnya. Pers golongan kiri mempunyai ciri:

- Beritanya mendukung upaya PKI untuk mencapai kekuasaan.
- Menulis berita yang menyudutkan pihak yang dipandang menghalangi PKI dalam mencapai tujuannya.
- Menulis berita tentang sisi baik PKI.

Kedua golongan tersebut saling mejatuhkan dan berusaha mendapatkan simpati di masyarakat untuk meraih tujuannya masing-masing. Perang dikalangan pers itu berlanjut sampai akhirnya golongan kiri kalah dengan dibredelnya surat kabar-surat kabar pro PKI menyusul dengan terjadinya pemberontakan G 30 S di pusat dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA